**Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal**

Studi Kasus di Kampung Loloan Kab. Jembrana Provinsi Bali[[1]](#footnote-1)

Sabarudin dan Mahmud Arif

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: sabarudinazki@yahoo.co.id

**Abstract**

*Keragaman adalah realitas kehidupan bangsa Indonesia, baik secara etnis, bahasa, budaya, ataupun agama. Dalam konteks itu, menelisik keragaman masyarakat Bali tentu sangat menarik mengingat ia tidak sekedar sebuah “kenyataan”, melainkan juga sebuah kemestian dan kebutuhan. Dengan demikian, kantong keragaman masyarakat menjadi tolok ukur penting karena ia ibarat tempat penyemaian benih pluralisme dan medium artikulatif eksperimentasi masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Di sinilah menariknya Kampung Loloan Jembrana sebagai sebuah desa yang mayoritas penduduknya Muslim di tengah kuatnya pengaruh Hindu. Kampung ini bisa menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang plural secara kultur-keagamaan. Kampung itu memiliki keunikan historis dan kearifan lokal yang selama ini berhasil merekat simpul kebersamaan lintas iman.*

Diversity is the reality of Indonesian life, whether ethnically, linguistically, culturally, or religiously. In that context, examining the diversity of Balinese society is certainly very interesting considering it is not just a "reality", but also a necessity and a need. Thus, the pockets of community diversity become an important benchmark because it is like a seeding ground for pluralism and the articulative medium of community experimentation in addressing differences. This is where the attractive village of Loloan Jembrana as a village that is predominantly Muslim in the midst of strong Hindu influence. This village can be a picture of a plural-culturally religious community life. The village has a historical uniqueness and local wisdom that has managed to glue the knot of interfaith togetherness.

Key words: Local wisdom, Balinese exoticism, Loloan village, the knot of togetherness

**Pendahuluan**

Kemajemukan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan bangsa Indonesia, baik secara etnis, bahasa, budaya, ataupun agama yang manakala hal ini terkelola dengan baik akan menampilkan pelangi nusantara dengan pelbagai pesonanya. Dalam konteks itu, menelisik kemajemukan masyarakat Bali tentu sangat menarik mengingat ia tidak sekedar sebuah “kenyataan” yang tidak dapat dinegasikan, melainkan juga sebuah kemestian dan kebutuhan yang perlu dikelola secara bijak. Sebab, Bali sebagai daerah destinasi wisata dituntut bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengesankan. Masyarakat Bali dinilai memiliki eksotisme kultural dan alam yang telah menobatkannya sejak lama sebagai destinasi wisata unggulan di Tanah Air. Banyak predikat yang disematkan untuk menggambarkan eksotisme tersebut, antara lain: *the Paradise Island*, *the Island of God,* *the Mystical Island* [[2]](#footnote-2), dan bahkan *the Best Honeymoon destination*. Pelbagai predikat tersebut sekaligus mengindikasikan kuatnya ingatan publik menyangkut pesona Pulau Dewata.

 Atas dasar itu, tidak berlebihan apabila Bali secara luas dipersepsikan sebagai daerah yang harmonis, eksotis, dan apolitis.[[3]](#footnote-3) Hal ini tentu sangat beralasan, mengingat tidaklah mungkin dunia pariwisata di Bali mampu berkembang pesat manakala tanpa didukung dengan terciptanya keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Di sini, pariwisata telah menjadi sebuah “ideologi” akan signifikansi pencitraan harmoni karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi bersama.[[4]](#footnote-4) Pariwisata telah mendorong *multiplier effects* bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali sehingga mereka menganggap segala hal yang bisa merusak pencitraan, reputasi, dan kepentingan bersama tersebut harus segera diselesaikan agar “berkah” pariwisata tetap terus dinikmati.

 Eksistensi dan pamor Bali dengan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu menjadikan Pulau Dewata ini dinilai unik. Menurut Clifford Geertz, praktik sesaji dan ritual keagamaan orang Bali menunjukkan bahwa mereka lebih sibuk mempraktikkan agama daripada banyak sekedar memikirkan tentang agama.[[5]](#footnote-5) Maka dari itu, tidak aneh sekiranya banyak pihak mempersepsikan orang Bali adalah orang Hindu, dan prosesi ritual keagamaan mereka memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Namun demikian dikaitkan dengan realitas empiris yang ada, persepsi tersebut jelas tidak sepenuhnya benar. Sebab, banyak orang Bali yang beragama non Hindu, baik dari penduduk asli Bali maupun dari pendatang. Apabila Indonesia selama ini dianggap sebagai salah satu negara paling beragam di dunia dan negara yang memiliki pengalaman panjang menghadapi keragaman[[6]](#footnote-6), maka dalam konteks itu Bali adalah salah satu miniatur terbaik untuk merepresentasikan realitas tersebut.

 Sewajarnya, kalangan Indonesianis banyak menaruh perhatian terhadap pola kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat Bali, seperti Ben Anderson, Anthony Reid, Clifford Geertz, Geoffrey Robinson, dan Miquel Covarubbias. Perspektif kalangan Indonesianis mengenai kehidupan keagamaan dan budaya Bali tidaklah monolitik. Di satu sisi, ada yang cenderung memandang eksotisme Bali dengan ke-Hindu-annya, keindahan alamnya, dan kekayaan kulturalnya; di sisi lain, ada yang cenderung melihat dinamika historis Bali yang sarat diwarnai ketegangan dan konflik. Bahkan ada juga para ahli yang melihat eksotisme Bali dan ekses-ekses yang timbul dari modernisasi di sana[[7]](#footnote-7), dengan segala berkah dan potensi ancaman yang timbul.

 Secara akademis, variasi pendapat di kalangan para ahli mengenai hubungan Bali dan Hindu sebagai agama “asali” dan mayoritas, atau eksotisme Bali tentu saja menarik untuk dibahas, mengingat masing-masing diabstraksikan dari hasil kajian lapangan. Pascabom Bali, terjadi dinamika sosio-kultural yang mencolok dalam kehidupan masyarakat di Bali. Bahkan secara ekstrim, ada yang menyebutnya “Bali yang Hilang” karena muncul banyak persoalan serius menyangkut tata kehidupan dan pola relasi sosial-keagamaan. Hal inilah yang melatarbelakangi gerakan *Ajeg Bali*, sebuah gerakan massif ingin mempertahankan dan melestarikan budaya Bali baik pada tataran individu, lingkungan kultural ataupun proses kultural, sebagai bentuk keprihatinan publik terhadap masalah akut yang menjangkiti perilaku masyarakat, seperti: keinginan kaya secara instan, konsumerisme, kebebasan seks, westernisasi, dan maraknya tindak kekerasan (konflik).

 Bali yang selama ini dikenal aman, damai, dan tenteram seolah tengah mengalami kelunturan budaya, dan secara perlahan cenderung bergerak menjauh dari budaya *adiluhung*. Dalam konteks Pilkada, misalnya, mencuat isu SARA untuk kepentingan kampanye, dan tidak sedikit telah terjadi konflik dan tindak kekerasan yang diakibatkan oleh kesadaran masyarakat akan kebhinekaan dan penghargaan mereka terhadap perbedaan sebagai dasar semangat kebangsaan tergerus oleh dorongan yang kian merangsek dari kepentingan ideologis atau pragmatis. Diletakkan dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, jelas patut disesalkan pemanfaatan isu SARA dan maraknya konflik kekerasan yang bernuansa SARA di pelbagai daerah[[8]](#footnote-8), apalagi sampai melibatkan tokoh agama/masyarakat yang bisa menciderai persatuan, kesatuan dan kerukunan warga serta keutuhan NKRI.

 Argumentasinya, konflik kekerasan bernuansa SARA jelas bertolak belakang dengan spirit kebangsaan yang telah lama dirajut dan diejawantahkan dalam kearifan lokal Bali *Tri Hita Karana*, yakni menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.[[9]](#footnote-9) Di sinilah, kantong-kantong keragaman masyarakat menjadi salah satu tolok-ukur penting mengingat kantong-kantong keragaman tersebut adalah ibarat tempat penyemaian benih pluralisme dan medium artikulatif eksperimentasi masyarakat dalam menyikapi perbedaan dan mengurai perselisihan. Dengan demikian, kantong-kantong masyarakat yang berhasil mengelola keragamannya, bahkan mendayagunakannya untuk kemaslahatan bersama berlandaskan pada potensi lokal, merupakan *epitome* kearifan yang menarik untuk dikaji. Realitas masyarakat yang begitu majemuk tentu memiliki mosaik kekayaan pengalaman yang unik antar satu daerah/komunitas dengan daerah/komunitas lain.

 Elizabeth K. Nottingham, seorang pakar Sosiologi Agama, menyebutkan bahwa fungsi-fungsi sosial dan psikologis yang diperankan oleh agama terbukti bersifat fundamental.[[10]](#footnote-10) Tidak heran jika kemudian agama dinilai sebagai salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat[[11]](#footnote-11) dan pembentukan tradisi kulturalnya. Dengan demikian, agama berarti tetap memainkan peran penting dalam ruang publik, interaksi sosial, dan kemodernan dan globalisasi tidak serta-merta memunculkan privatisasi agama atau agama akan terpinggirkan.[[12]](#footnote-12) Diletakkan dalam konteks ruang publik keragaman sosio-kultural, eksistensi kehidupan masyarakat yang mampu menyemai kerukunan hidup bersama melalui khazanah kearifan lokal sehingga pluralitas keberagamaan yang ada tidak menjadi sekat pemisah, dan pola interaksi sosial pun sedemikian cair bahkan mampu *passing over* (melintasi batas), adalah persoalan yang layak dikaji guna mengekstraksikan *“lessons learnt”* yang kontributif bagi upaya membangun kerukunan hidup antar umat beragama.

 Kampung Loloan Kab. Jembrana adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya Muslim[[13]](#footnote-13), di tengah kuatnya pengaruh Hindu sehingga bisa menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang plural secara kultur-keagamaan. Kampung itu memiliki keunikan tersendiri, yakni Loloan adalah kampung Muslim tertua dan terbesar di Kab. Jembrana yang secara historis tidak bisa dipisahkan dari pengaruh budaya Bugis dan Melayu. Di kampung tersebut, warga masyarakat menganut agama yang berbeda, masing-masing kelompok penganut agama mempunyai tempat peribadatan dalam lokasi yang berdekatan, dan mereka merasakan kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya. Pola kehidupan semacam itu telah berlangsung lama, bahkan menjadi kekhasan “religius-kultural” masyarakat kampung tersebut. Maka dari itu, sewajarnya apabila ditelisik banyak *inisiasi* dan *karya kolektif* yang tumbuh berkembang dari kearifan lokal, interaksi sosial, dan keguyupan sosio-kultural.

 Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah: Nilai-nilai kearifan sosio-kultural apakah yang mendasari masyarakat Kampung Loloan Kab. Jembrana Provinsi Bali dalam memelihara kebersamaan di tengah perbedaan agama? Bagaimana aktualisasi nilai-nilai kearifan sosia-kultural tersebut dalam interaksi antar warga masyarakat sehingga mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama? Persoalan utama apakah yang dihadapi masyarakat Kampung Loloan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan tersebut untuk memelihara kerukunan antar umat beragama?

**Kajian Pustaka**

*Penelitian Terdahulu*

 Kajian dan penelitian tentang Kearifan Lokal Masyarakat Nusantara dan Bali telah dilakukan oleh banyak pihak. Di antara hasil kajian/penelitian yang perlu diuraikan di sini adalah: **pertama**, Suprapto, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*.[[14]](#footnote-14) Buku yang berasal dari penelitian disertasi ini memaparkan kehidupan yang harmonis masyarakat minoritas Hindu di tengah mayoritas Muslim di Lombok. Kedua kelompok masyarakat yang berbeda agama dan kultur tersebut mampu hidup berdampingan secara damai, dan kelompok minoritas Hindu pun memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Nilai-nilai kearifan lokal di sana berguna untuk membangun kehidupan harmonis antar warga yang berbeda keyakinan, bahkan warga minoritas tidak merasa tersisihkan oleh warga mayoritas.

 **Kedua**, “Kearifan Lokal Masyarakat Jatiluwih: Potensi Warisan Budaya Dunia”, laporan penelitian kelompok (I Nyoman Dhana dkk.) Universitas Udayana tahun 2014. Desa Jatiluwih Tabanan Bali yang memiliki status ganda, yaitu sebagai daerah tujuan wisata dan sebagai warisan budaya dunia, memiliki kearifan sosial dan kearifan lingkungan yang menunjang pelestarian warisan budaya dunia dan daerah tujuan wisata. Hasil penelitian kelompok ini lebih banyak menganalisis keberadaan dan peran kearifan lokal sosial dan lingkungan yang terbukti kontributif melestarikan status ganda desa. Hasil penelitian sama sekali tidak menyinggung makna kearifan lokal bagi keharmonian hidup antar umat beragama. Memang sedikit diungkap kearifan lokal yang dilandasi oleh Hinduisme sebagai ajaran agama yang dianut warga setempat, akan tetapi tanpa adanya keterkaitan dengan pengaruh agama non Hindu (baca: masih kearifan lokal “monolitik’).[[15]](#footnote-15)

 **Ketiga**, Indriana Kartini (LIPI), “Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali”, Jurnal *Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII, Number 2, 2011. Tulisan yang berasal dari penelitian masyarakat minoritas Muslim di Bali ini memaparkan multikulturalisme di Bali yang setidaknya ditunjukkan oleh sejarah panjang eksistensi minoritas Muslim di sana. Sayangnya, hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari banyak kajian tentang Bali. Padahal akulturasi Islam, Hindu, dan Bali telah menghasilkan kekayaan kultural dan kearifan lokal yang tidak “Hinduisme-sentris”. Bahkan akulturasi Islam, Hindu, dan Bali tidak hanya terlihat pada minoritas Muslim, tetapi juga terlihat pada mayoritas Hindu. Selain diwarnai harmoni dan kerukunan, dinamika hubungan antara Muslim dan Hindu di Bali juga tak luput dari aneka ketegangan dan konflik, semisal menyangkut pendirian rumah ibadah, pemakaman, dan kegiatan dakwah.[[16]](#footnote-16)

 **Keempat,** AAGN Ari Dwipayana (ed), *Bulan Sabit di Pulau Dewata: Jejak Kampung Kusamba-Bali* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2012). Buku monograf hasil penelitian lapangan ini menganalisis sejarah kampung Islam, renegosiasi kampung Islam di tengah desa-desa Hindu, toleransi dan ketegangan sebagai wujud pengelolaan keragaman, khususnya di Kampung Kusamba-Bali. Pendek kata, monograf hasil penelitian tersebut menjelaskan identitas Muslim di tanah Hindu (Bali), sekaligus mengungkapkan pola relasi Muslim-Hindu. Setidaknya, terdapat dua ruang komunitas yang dimiliki oleh minoritas Muslim, yaitu Kampung Muslim dan desa dinas. Di antara hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut adalah (1) lokasi kasus penelitian yang difokuskan pada dua kampung dengan variasi *setting* sosio-historis wilayah kabupaten yang berbeda, kendati sama-sama sebagai daerah yang layak dianggap miniatur kemajemukan masyarakat dan pusat budaya Bali, dan (2) *setting* masyarakat yang dikaji lebih bersifat “kontekstual”, yaitu unik, dialektis, dan bermakna sosial.[[17]](#footnote-17)

 **Kelima,** I Gede Suwindia, dkk., “Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali”, *Jurnal al-Ulum*, Vol. 12, Nomor 1, 2012, yang membahas relasi Islam dan Hindu di daerah Denpasar, Karangasem, dan Singaraja. Hubungan harmonis keduanya diperkuat oleh tatanan budaya Bali yang masih lestari hingga kini sebagai bentuk kearifan lokal, ikatan perkawinan, dan simpul-simpul sejarah lainnya. Tanpa menafikan adanya riak-riak kecil dalam relasi Islam dan Hindu, seperti perkelahian antara remaja Muslim dan Hindu yang melibatkan massa, namun berkat kesigapan tokoh agama keduanya, perkelahian pun bisa segera diselesaikan sebelum meluas.[[18]](#footnote-18)

 **Kerangka Teoritik**

 Dinamika kehidupan sosial senantiasa diwarnai oleh harmoni dan konflik, kontestasi dan kerjasama. Asumsi dasar ini mengafirmasi bahwa keberhasilan setiap kelompok sosial untuk hidup berdampingan dengan kelompok lain adalah suatu capaian dalam meminimalisasi potensi konflik yang ada.[[19]](#footnote-19) Faktor keberhasilannya sangat mungkin beragam, baik internal maupun eksternal; keagamaan maupun kultural. Dalam kaitan ini, diperlukan kesediaan bersama antar kelompok sosial untuk merestorasi faktor keberhasilan tersebut, bahkan mengembangkannya menjadi sebuah *local wisdom* yang konstruktif bagi harmoni, kerjasama, dan integrasi masyarakat yang plural.

 Dalam tinjauan Sosiologi, setiap masyarakat memiliki tiga sistem, yaitu: sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem budaya.[[20]](#footnote-20) Sistem sosial terbentuk melalui pola interaksi warga dalam suatu masyarakat yang bisa menimbulkan ketegangan atau harmoni. Sistem kepribadian tersusun atas sejumlah disposisi kebutuhan masing-masing individu yang menuntut pemenuhan, semisal hasrat, preferensi, dan keinginan. Upaya pemenuhannya dibentuk oleh proses sosialisasi dan sistem nilai. Dalam hal ini, pengaturan dibutuhkan untuk menjaga tatanan sosial. Sistem budaya adalah seperangkat nilai/simbol yang memungkinkan warga berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerjasama. Terdapat tiga wilayah penerapan sistem budaya: ranah simbol kognitif, ranah simbol ekspresif, dan norma moral. Dengan demikian, dinamika masyarakat ditentukan oleh basis sosio-kultural yang melandasi warga dalam mengartikulasikan kepentingan, menjalin interaksi sosial, dan membangun konsensus mewujudkan cita bersama. Basis sosio-kultural yang diakui positif, dianggap milik bersama, dan digunakan untuk menata kehidupan masyarakat sebenarnya merupakan wujud kearifan lokal.

 Secara umum, terdapat tiga model strategi yang diterapkan oleh agama-agama dalam menghadapi situasi pluralistik saat ini[[21]](#footnote-21), yakni (1) strategi penaklukan atau revolusi keagamaan yang berusaha menyatukan keragaman dalam satu pandangan yang dinilai benar, (2) strategi pengasingan diri yang mencoba membuat benteng-benteng pertahanan dan bersikap eksklusif agar tidak hanyut terbawa arus deras kemajemukan, dan (3) strategi dialogis yang membuka diri untuk *sharing* pelbagai ide-pemikiran dan bersedia untuk saling berinteraksi dengan kelompok lain. Sebagai wadah mobilisasi massa, kelompok-kelompok sosial-keagamaan dalam memilih strategi bagi artikulasi paham dan gerakannya di ruang publik tentu saja dipengaruhi oleh nilai yang dianut, konteks sosial-budaya yang mengitari, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kelangsungan kelompoknya. Di sinilah, sangat dimungkinkan berlangsungnya *internal dynamics* pada masing-masing kelompok dalam masyarakat, kerjasama, interaksi, dan akomodasi dalam pola hubungan sosial.

 Hubungan harmonis antar umat beragama di Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Karena itu, secara serius perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu kualitas hubungan yang lebih baik antar umat beragama.[[22]](#footnote-22) Dengan demikian, upaya kultural-performatif semisal melalui pelbagai aktivitas sosial bersama sangat dibutuhkan. Dalam konteks ini, tokoh agama/masyarakat dituntut mengembangkan pola interaksi yang mengedepankan sintesis, dialog (pengembangan kemampuan warga untuk menjadi pendengar yang baik, cakap menganalisis, dan tangkas memberikan argumen balik secara santun), dan *caring* (tokoh harus menjadi figur yang penuh perhatian, tanggap terhadap kebutuhan, dan peduli akan nasib warga).

 Di tengah dinamika kehidupan masyarakat menghadapi beragam permasalahan sosio-kultural yang kompleks, kearifan lokal dibutuhkan sebagai (1) penanda identitas sebuah komunitas, (2) elemen perekat lintas warga, (3) kesadaran dari dalam sehingga tidak bersifat “memaksa”, (4) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas, (5) pengubah pola pikir dan hubungan interaktif di atas pijakan *common ground*, (6) pendorong proses apresiasi dan partisipasi, sekaligus pengurang anasir yang merusak integrasi social.[[23]](#footnote-23) Bahkan dari hasil studi kebudayaan, di beberapa daerah di tanah air, seperti masyarakat Badui di Banten dan masyarakat Maluku, kearifan lokal terbukti berguna untuk menjaga keseimbangan alam sehingga pengelolaan sumberdaya alam tidak sampai merusak lingkungan.[[24]](#footnote-24) Faisal Islam, dalam makalahnya yang berjudul “Memberdayakan Kearifan Lokal dalam Mencegah Konflik Komunal”, menilai perlunya suatu kebijakan strategis untuk mewujudkan kerukunan dan mengatasi konflik komunal.[[25]](#footnote-25) Kebijakan strategis itu dapat direalisasikan, antara lain, melalui (1) fungsionalisasi pranata sosial, (2) penggalian nilai kearifan lokal, (3) perluasan partisipasi segenap lapisan masyarakat, dan (4) pengembangan lembaga-lembaga baru yang kontributif bagi upaya penguatan kerukunan hidup bersama.

**Metode Penelitian**

Penelitian adalah upaya penemuan fakta melalui langkah berpola. Penelitian ini termasuk studi empirik dengan pendekatan kualitatif terhadap kehidupan masyarakat yang majemuk akan tetapi antarwarganya tergolong memiliki keterlibatan aktif dalam membangun kerukunan, yaitu: masyarakat Kampung Kecincang-Islam dan Kampung Loloan di Bali. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan tokoh dan warga masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui laporan hasil kajian mengenai Islam di Bali, baik yang dipublikasikan secara *offline* maupun *online*. Apabila bertolak dari pemetaan penelitian kualitatif Bodgan dan Biklen, maka penelitian ini termasuk kedalam *Sociocultural Studies* karena menggunakan *framework* tertentu dan berdasar asumsi teoritik bahwa dunia bukanlah “sesuatu hal yang bisa diketahui langsung” (*directly knowable*)[[26]](#footnote-26), karena memerlukan pendekatan emik dan bergantung pada perspektif yang digunakan peneliti guna melakukan *thick description* (pelukisan mendalam).[[27]](#footnote-27)

 Sebagai bentuk *sociocultural studies*, penelitian ini mengasumsikan bahwa (1) semua relasi sosial dipengaruhi faktor tertentu yang perlu diterangkan dalam konteks spesifik, dan (2) semua penelitian berangkat dari acuan pemahaman teoritik. Setelah ditentukan informan, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan warga, dari kampung Kecicang-Islam dan kampung Loloan sebagai subyek penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui (1) wawancara terhadap informan terkait, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, (2) pengamatan (observasi), dan (3) dokumentasi, dengan kolaborasi horisontal (*horizontal collaboration*), yakni kolaborasi internal antar sesama peneliti, dalam proses analisis data yang meliputi tahapan: pencatatan data lapangan, analisis data lapangan, dan pergerakan menuju ke hasil. Selanjutnya, untuk sampai pada tahap temuan penelitian dan konstruksi teori, diterapkan induksi analitik, yakni proses pengujian menyeluruh terhadap data hasil penelitian yang dikonseptualisasi secara bermakna melalui “saling mempertajam antara teori dan data” dengan simultan dalam rangka sampai pada penyimpulan (pemaknaan).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Akulturasi Islam dan Bali**

Eksotisme Bali telah menimbulkan daya tarik tersendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya turis yang datang untuk berwisata, banyaknya pendatang dari luar yang tinggal untuk mengais rezeki, dan banyaknya ilmuwan yang menjadikan Bali sebagai obyek kajian.[[28]](#footnote-28) Selain eksotisme alam dan budaya sebagai destinasi wisata terkenal, hingga kini Bali juga dikenal luas sebagai salah satu wilayah di Tanah Air yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Karena itu, Bali dan Hindu seolah telah menjadi dua entitas “kultural” yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan; Bali dianggap identik dengan Hindu, dan Hindu pun menjadi sumber pembentukan identitas religio-kultural utama masyarakat Bali. Atas dasar ini, cukup beralasan sinyalemen sebagian ahli yang menyatakan bahwa kebudayaan Bali adalah budaya agama[[29]](#footnote-29), yakni budaya yang banyak bersumber dari ajaran Hindu.

 Keterkaitan erat Bali dan Hindu dikuatkan oleh kepercayaan masyarakat di Bali bahwa Gunung Agung dan Pura Besakih merupakan pusat pulau Bali.[[30]](#footnote-30) Selain itu, adanya pelapisan masyarakat (kastanisasi) di Bali yang didasarkan pada konsep *catur warna* atau *catur warga*, yakni: golongan Brahmana yang memiliki status paling tinggi, kemudian golongan Ksatrya, Weisya, dan golongan Sudra yang memiliki status paling rendah, juga menegaskan akan keterkaitan erat antara Bali dan Hindu. Secara historis, keterkaitan Bali dan Hindu terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Bali menerima pengaruh kuat Kerajaan Majapahit di Jawa. Saat Majapahit berada pada puncak kejayaannya, Bali menjadi salah satu daerah penting dengan adanya pusat kekuasaan yang kemudian menjadi Kerajaan Gelgel dengan luas wilayah hingga Lombok, Sumbawa, dan Blambangan.[[31]](#footnote-31) Kerajaan ini semakin menguat seiring melemahnya Majapahit. Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan Nasrulloh, salah seorang tokoh Muslim Kampung Gelgel, yang menuturkan, “Sejarah terbentuknya kampung muslim Gelgel bermula dari empat puluh prajurit muslim dari Majapahit yang ditugaskan untuk mengawal Raja Gelgel. Lalu sebagai wujud penghargaan Raja Gelgel, mereka kemudian diberi tanah perdikan untuk ditinggali dengan otonomi khusus”.[[32]](#footnote-32)

 Di samping kerajaan Gelgel, terdapat kerajaan lain di Bali yang memiliki pengaruh luas terhadap sejarah perkembangan Hindu, Islam, dan kebudayaan Bali, antara lain: kerajaan Karangasem dan kerajaan Buleleng. Dengan wilayah kekuasaan hingga Lombok dan Sumbawa, intrik perebutan kekuasaan, peperangan antar kerajaan di Bali, dan politik persahabatan demi menjamin berlangsungnya kekuasaan, telah mengundang kedatangan dan keterlibatan orang-orang Bugis Makassar dan Sasak Lombok. Dari sini, bisa dipahami manakala banyak didirikan masjid di sekitar Karangasem dan ditemukan daerah kantong muslim, seperti Loloan Jembrana dan Kecicang Karangasem. Namun demikian, tidak berarti perkembangan Islam sepenuhnya karena “berkah” kepentingan politis penguasa, mengingat banyak juga para pendakwah Islam yang datang ke Bali dengan tujuan utama untuk menyebarluaskan Islam.

 Meski keterkaitan Bali dan Hindu begitu kuat, akan tetapi dalam sejarahnya Bali tidak pernah menutup diri bagi kehadiran komunitas lain. Hal ini disinyalir menjadi salah satu faktor di balik mengapa Bali tetap Hindu di tengah kepungan Islam yang berkembang pesat di Jawa dan Lombok, karena Bali tidak pernah secara nyata “anti Islam”. Sewajarnya apabila kerajaan-kerajaan Islam pasca runtuhnya Majapahit tidak menganggap Bali dengan ke-Hindu-annya sebagai ancaman serius yang harus ditundukkan. Selain itu, kerajaan-kerajaan Hindu di Bali pun menerapkan strategi bertahan yang “ramah” melalui pembentukan basis-basis komunitas Muslim di sekitar pusat kerajaan, seperti terlihat di Puri Karangasem yang dikelilingi kampung Muslim. Dari sinilah dimulainya hidup berdampingan secara damai antara komunitas Muslim dan warga Hindu di Bali. Bagi warga Hindu Bali, komunitas muslim dianggap *nyama selam* atau saudara Islam.[[33]](#footnote-33) Untuk menjaga kerukunan hidup bersama, berlangsung tradisi *ngejot* yaitu berbagi makanan dari saudara Muslim ke saudara Hindu dan juga sebaliknya pada hari raya tertentu yang menjadi modal sosial dalam membangun solidaritas antar etnis dan antaragama.[[34]](#footnote-34)

 Ada analisa menarik menyangkut mengapa Bali tetap Hindu, baik dengan perspektif *niskala* ataupun *sekala*. Perspektif pertama cenderung menjelaskan dari aspek metafisis bahwa para tokoh Hindu seperti *Danghyang Nirartha* telah membuat benteng gaib di seluruh pesisir Bali yang tidak bisa ditembus oleh para penyerbu dari luar. Penjelasan ini disebarluaskan dari mulut ke mulut dan masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Hindu Bali. Sementara itu perspektif kedua yang lebih masuk akal menjelaskan dari aspek historis bahwa pada saat Majapahit mulai kehilangan dominasinya, sebagian besar wilayahnya mengalami Islamisasi tetapi tetap dengan budaya maritim. Tidak seperti halnya Jawa, Bali tidak memiliki pelabuhan perdagangan utama, rempah-rempah pun tidak signifikan tumbuh di Bali, dan kondisi masyarakatnya masih bercorak agraris sehingga pulau ini tidak termasuk kedalam jalur sutera (*silk road*) yang dilalui para pedagang dan pendakwah muslim. Selain itu, kedatangan Belanda menyebabkan perhatian kerajaan Mataram Islam terpecah, yakni menghadapi penjajah dan sekaligus mengatasi ancaman disintegrasi internal, karena itu tidak sempat melakukan ekspansi kekuasaan sampai ke Bali.

 Sebagian ahli berpandangan, masuknya Islam ke Bali tergolong unik mengingat dalam sejarahnya komunitas Muslim yang datang ke pulau ini memperoleh ijin khusus untuk tinggal secara permanen atau bahkan karena permintaan dengan tugas langsung dari puri/istana kerajaan Hindu Bali. Sewajarnya, apabila mereka kemudian mendiami daerah tertentu, memiliki hubungan dekat dengan puri, dan tidak melakukan ekspansi wilayah/pengaruh dan kegiatan misi dakwah. Di satu sisi, hal itu menjadi modal utama komunitas Muslim untuk bisa diterima masyarakat Hindu Bali. Akan tetapi di sisi lain, penyebaran Islam menjadi terlokalisir karena hanya berkembang di kantong-kantong tertentu. Fenomena inilah yang dinamakan dengan politik karantinaisasi para penguasa di berbagai kerajaan Hindu di Bali masa itu terhadap penduduk Islam ("Islam(isasi) di Bali".[[35]](#footnote-35)

 Penyebaran Islam secara kultural yang dilakukan oleh para wali juga berlangsung di Bali. Ada beberapa tokoh penyebar Islam di Bali, yang dikenal dengan Walipitu, antara lain: Syaikh Chamdoen Khoirussoleh atau Pangeran Mas Sepuh, putera Raja Mengwi VII (Cokorda I) dari ibu yang berasal dari Blambangan atau Banyuwangi. Makamnya berada di pantai Seseh Badung Bali; Habib Umar bin Maulana Yusuf al-Maghribi yang makamnya terletak di salah satu bukit di Bedugul Tabanan; Habib Ali bin Abu Bakar al-Hamid yang menyebarkan Islam di wilayah Klungkung dan pernah diangkat sebagai penerjemah dan ahli bahasa kerajaan Gelgel; Syaikh Maulana Yusuf al-Maghribi yang menyebarluaskan Islam di wilayah Karangasem; Syaikh Abdul Qodir Muhammad yang menyebarkan Islam di wilayah Buleleng dan konon beliau merupakan salah seorang murid Sunan Gunungjati; dan Habib Ali bin Umar Bafaqih yang menyebarkan Islam di Loloan Jembrana. Sebagian mereka adalah pendatang yang bertujuan untuk melakukan syiar Islam di Bali, dan sebagian lainnya adalah “putera daerah" yang telah memeluk Islam dan melakukan kegiatan dakwah di sana.

 Proses dakwah Islam berlangsung dalam suasana harmonis, tanpa terjadi gesekan berarti antara umat Islam dan umat Hindu. Menurut sinyalemen sebagian ahli, setidaknya terdapat empat faktor penting yang mendasari hal tersebut, yaitu: *pertama*, penganut agama Hindu adalah warga asli Bali dengan pola pikir dan budaya khasnya, bukan Hindu berlatar India. Demikian juga, penganut agama Islam berciri khas Indonesia, bukan berciri kultur Arab. Dengan corak itu, umat Islam dan umat Hindu di Bali pun mampu menjalin keharmonisan. Kedua, umat Islam yang datang ke Bali cenderung mengembangkan syiar Islam secara persuasif. Ketiga, pada masa kerajaan dulu, Bali tidak pernah terlibat konflik dengan raja-raja Jawa. Keempat, agama Hindu Bali dan Islam memiliki kemiripan dalam cara pandang kulturalnya, seperti menjaga harmoni dengan alam.[[36]](#footnote-36)

**Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Loloan**

Awal mula berdirinya kampung muslim Loloan telah berlangsung ratusan tahun silam dan hingga sekarang kampung ini masih eksis. Kampung Loloan meliputi Loloan Timur dan Loloan Barat, yang dipisahkan oleh sungai Ijo Gading dan satu-satunya jalan yang menghubungkan kedua kampung “kembar” ini adalah jembatan Syarif Tua. Semua penduduk Loloan Barat beragama Islam, sedangkan di Loloan Timur hanya satu dusun yang penduduknya mayoritas beragama Islam.[[37]](#footnote-37) Kampung Loloan terletak di kecamatan Jembrana Kab. Jembrana Provinsi Bali. Warga kampung ini dinilai unik karena mempunyai bahasa sendiri dalam berkomunikasi antar warga yang berbeda dengan bahasa Bali.[[38]](#footnote-38) Konon, bahasa unik tersebut berasal dari campuran bahasa Bugis, Melayu dan Bali. Jumlah penduduk kedua kampung Loloan lebih dari 65.000 jiwa. Untuk Desa Loloan Barat, semua penduduknya menganut Islam, sedangkan Loloan Timur, hanya satu dusun yang semua penduduknya beragama Islam.[[39]](#footnote-39) Dua dusun lainnya di Loloan Timur, mayoritas penduduk beragama Hindu. Karena itu, sewajarnya apabila Kepala Desa Loloan Timur berasal dari penganut agama Hindu.

 Di Loloan Barat, perbedaan yang lebih terlihat adalah menyangkut paham keagamaan yang dianut masyarakat, yaitu Islam “tradisionalis” sebagai paham yang diikuti warga mayoritas dan Islam “modernis” sebagai paham yang dianut warga minoritas. Masing-masing kelompok memiliki masjid sendiri: satu masjid di sebelah barat jalan utama dan satu masjid di sebelah timur jalan utama. Jarak kedua masjid tidak terlalu jauh, dan sama-sama menunjukkan kesemarakan dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan terutama di waktu petang hari. Masjid utama Loloan Barat, yaitu masjid Mujahidin, memiliki kapasitas menampung jama’ah yang lebih banyak. Di dalam masjid ini, ada *kentongan* dan *bedug* yang sangat besar serta menara tinggi.[[40]](#footnote-40)

 Sekitar berjarak dua ratus meter ke arah selatan masjid, terdapat Makam Habib Ali Bin Umar Bafaqih yang lebih dikenal dengan “Wali Pitu” sebagai salah satu tokoh penting bagi penyebaran Islam di wilayah Jembrana. Banyak pengunjung dari pelbagai daerah, termasuk dari Pulau Jawa, yang mendatangi makam tersebut untuk memanjatkan do’a sekaligus berharap atas ijin Allah bisa memperoleh berkah dengan menziarahi makam Wali Pitu tersebut. Masih dalam lingkungan kompleks makam, ada lembaga pendidikan Pondok Pesantren (PP) Syamsul Huda yang menjadi pusat tempat belajar agama Islam bagi masyarakat sekitar. Kendati tidak menjadi bagian dari situs wisata religi yang dipromosikan Pemkab Jembrana, Makam Wali Pitu tetap saja ramai didatangi oleh para pengunjung yang tentu saja hal ini sangat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Loloan dan Kabupaten Jembrana.

 Keberadaan situs wisata religi Makam Wali Pitu yang senantiasa dibanjiri penziarah tidak hanya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), juga menjadi simbol kultural simpul kebersamaan warga Muslim dan Non Muslim yang telah lama terbangun. Sebab, semua warga merasakan manfaat “ekonomis” kunjungan banyak penziarah, seperti halnya manfaat pariwisata yang menjadi ikon Bali. Simbol kultural simpul kebersamaan dibutuhkan untuk memelihara kerukunan hidup dalam kemajemukan. Untuk konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah contoh simpul kebersamaan yang telah berhasil dirumuskan oleh para pendiri bangsa, sebagai bentuk kesepakatan bagi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, paham dan gerakan keagamaan di Tanah Air yang berusaha menolak ideologi Pancasila dapat dinilai sebagai upaya agitatif untuk pelepasan simpul kebersamaan dan sangat potensial memunculkan ancaman bagi disintegrasi nasional.

 Simpul kebersamaan yang terbukti efektif untuk mewujudkan harmoni sosial dan diterima secara positif sebagai warisan kultural masyarakat setempat merupakan sumber pembentukan kearifan lokal yang memang sangat dibutuhkan untuk (1) penanda identitas sebuah komunitas, (2) elemen perekat lintas warga, (3) kesadaran dari dalam sehingga tidak bersifat “memaksa”, (4) pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas, (5) pengubah pola pikir dan hubungan interaktif di atas pijakan *common ground*, (6) pendorong proses apresiasi dan partisipasi, sekaligus pengurang anasir yang merusak integrasi sosial.[[41]](#footnote-41) Bahkan dari hasil studi kebudayaan, di beberapa daerah di Indonesia, seperti masyarakat Badui di Banten dan masyarakat Maluku, kearifan lokal terbukti berguna untuk menjaga keseimbangan alam sehingga pengelolaan sumberdaya alam tidak merusak lingkungan.[[42]](#footnote-42)

 Sisi lain simpul kebersamaan yang masih dilestarikan adalah kegiatan *Loloan Tempo Doeloe*.[[43]](#footnote-43) Menurut penuturan informan, “Dalam acara *Loloan Tempo Doeloe*, semua warga dari pelbagai lapisan masyarakat, termasuk warga Hindu dan pejabat pemerintah desa setempat, seperti Kepala Desa Loloan Timur yang beragama Hindu, ikut hadir untuk memeriahkannya”. Meski inisiator pelaksanaan kegiatan tersebut adalah warga Muslim Kampung Loloan Timur, namun karena kemasan kegiatannya mengenai sejarah Loloan Timur dengan tradisi kebersamaannya, maka semua warga merasa memiliki. Bahkan kegiatan *Loloan Tempo Doeloe* menjadi ajang kumpul bersama dan penyampaian aspirasi warga tanpa ada sekat sosial. Warga dan generasi muda diajak untuk menapak tilas sejarah desa pada zaman dahulu agar timbul rasa cinta kampung halaman dan sadar akan warisan luhur generasi pendahulu yang sarat dengan kesahajaan dan kebersamaan. Banyak apresiasi yang diberikan oleh para tokoh masyarakat atas pelaksanaan kegiatan *Loloan Tempo Doeloe* yang ditunjukkan oleh dukungan dan kehadiran mereka.

 Selain kegiatan *Loloan Tempo Doleloe*, masyarakat Muslim di sana setiap tahun sekali mengadakan acara *Muharraman* (acara tahun baru Islam) yang dimeriahkan dengan pentas seni, shalawatan, dan refleksi sejarah perkembangan Islam.[[44]](#footnote-44) Adanya unsur seni dan hiburan menjadikan acara tersebut tidak hanya menjadi daya tarik bagi warga Muslim, tetapi juga bagi warga masyarakat lain. Semua warga masyarakat, bahkan juga dari luar desa, turut memeriahkan acara dalam suasana suka-cita dan kebersamaan. Tidak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk mengais rejeki melalui berjualan makanan, minuman, dan mainan karena begitu banyaknya pengunjung yang datang dalam keramaian.

Kegiatan *Loloan Tempo Doeloe* dan *Muharraman* merupakan indikasi empirik bahwa keberadaan warga Muslim Kampung Loloan berperan nyata terhadap budaya masyarakat setempat yang mayoritas beragama Hindu. Sejarah panjang Islamisasi di Kampung Loloan melalui penetrasi konstruktif dan toleran meninggalkan warisan budaya dalam kehidupan yang harmonis dengan penganut agama lain. Hal inilah yang mengilhami warga Muslim Kampung Loloan berhasil melaksanakan *the expected roles* guna merajut kebersamaan dan kerukunan hidup, baik antar sesama Muslim maupun antar warga Muslim dengan penganut agama lain. Tradisi *Loloan Tempo Doeloe* dan *Muharraman* menjadi bagian dari modal sosial yang bersumber dari kearifan lokal dalam merawat kerukunan di tengah kemajemukan; tidak hanya kohesi internal masyarakat seagama yang perlu diperkuat, melainkan juga kohesi eksternal melalui pengembangan *mutual respect* yang mampu memupuk afinitas antar warga lintas agama.

**Aktualisasi Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Muslim di Loloan Jembrana**

Dalam kehidupan bersama, keragaman acapkali menjadi pemicu timbulnya perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik. Maka dari itu, dibutuhkan penyikapan yang tepat terhadap keragaman dan kemampuan mengelolanya dengan baik. Ibarat pisau bermata dua, keragaman di satu sisi bisa digunakan untuk memotong simpul-simpul ikatan sosial sehingga persatuan terkoyak dan kebersamaan tercerai-berai; dan di sisi lain, bisa dimanfaatkan untuk memangkas egoisme diri dan kelompok yang kontraproduktif bagi upaya memupuk solidaritas sosial dan merajut kebhinnekaan. Kebhinnekaan merupakan realitas sosial yang tidak mungkin dipungkiri, melainkan harus disikapi secara bijak, bahkan dipandang ibarat pelangi yang sudah semestinya berwarna-warni untuk dapat mewujudkan keindahan hidup.

 Terbentuknya kampung Muslim Loloan memiliki sejarah panjang sehingga dinamai “kampung kuno”. Salah satu catatan sejarah menyebutkan bahwa komunitas Muslim Kampung Loloan merupakan keturunan dari tanah Melayu (Kuala Trengganu) dan kaum Bugis yang sudah beberapa abad lalu masuk ke Bali.[[45]](#footnote-45) Letak Kampung Loloan sekitar 25 km dari Pelabuhan Gilimanuk dan berjarak 84 km dari Kota Denpasar. Salah satu lembaga pendidikan Islam ternama di kampung ini adalah Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan al-Hadi dari Semarang pada tahun 1935. Beberapa peninggalan sejarah Islam masih terpelihara dengan baik, seperti ukiran kayu dan al-Qur’an tulisan tangan yang tersimpan di Masjid Bait al-Qadim (usia kedua peninggalan sejarah ini disinyalir sudah lebih dari dua ratus tahun). Sesuai dengan namanya, Masjid Bait al-Qadim juga merupakan peninggalan sejarah yang telah berusia lebih dari dua ratus tahun. Hanya saja telah mengalami beberapa kali pemugaran sehingga arsitekturnya tidak lagi sebagaimana bentuk semula.

 Sejarah Muslim Kampung Loloan terkenal dengan sejarah yang penuh perjuangan dan pembelajaran dari ulama berskala nasional dan internsional[[46]](#footnote-46) yang telah membangun fondasi kuat keagamaan bagi masyarakat Muslim di Jembrana. Salah satu sumber menyebutkan, mentalitas pejuang dipupuk oleh eks prajurit pembawa Islam pertama pada abad XVII di Jembrana. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, mayoritas warga Muslim Loloan menganut paham Islam “tradisionalis”. Mentalitas pejuang tersebut diwarisi oleh mereka, antara lain, terlihat dari terbentuknya Gerakan Pemuda Loloan (GPL) yang mengorganisir para pemuda Loloan untuk berkiprah dalam membentengi generasi muda dari pengaruh pergaulan bebas. Awal mulanya, gerakan itu hanya memiliki anggota yang sedikit. Namun berkat kegigihannya, GPL memperoleh dukunga luas dan kini memiliki empat tim kerja taktis. *Pertama*, Tim Loloan Foundation yang bergerak dalam menghimpun dana dari masyarakat berkecukupan, yang kemudian disalurkan kepada kaum dhu’afa dan siapa pun yang membutuhkan. *Kedua*, Tim Kajian Pojok Surau yang bergerak dalam bidang pengajian dan pengembangan budaya keislaman. *Ketiga*, Rumah Baca Loloan yang berjuang untuk memfasilitasi dan menumbuhkan minat baca generasi muda Loloan. *Keempat*, Tim Publics Relation yang mengupayakan terbangunnya kerjasama guna mendorong perekonomian masyarakat Loloan.[[47]](#footnote-47)

Sejarah hubungan harmonis komunitas Muslim Loloan dengan puri (istana) ditunjukkan oleh adanya ijin yang diberikan I Gusti Ngurah Pancoran sebagai penguasa Jembrana saat itu kepada rombongan laskar Sultan Wajo yang melarikan diri dari Sulawesi karena dikejar tentara kolonial Belanda, untuk berlabuh di Bandar Pancoran dan kemudian tinggal menetap di Kampung Loloan. Bandar Pancoran pun selanjutnya berkembang pesat sebagai pusat perdagangan Kerajaan Jembrana.[[48]](#footnote-48) Bahkan I Gusti Ngurah Pancoran (atau anggota keluarga puri) ada yang tertarik memeluk Islam. Pada abad berikutnya, ulama-ulama dari Melayu juga berdatangan ke Loloan. Komunitas Muslim di Loloan bahu-membahu dalam ikut aktif memperkuat armada kerajaan Hindu Bali. Dengan demikian, sejarah berdirinya Kampung Loloan dilatarbelakangi oleh pengabdian dengan penuh kesetiaan kepada raja. Leluhur kampung Muslim Loloan adalah bagian laskar yang membentengi puri dari serangan musuh. Kendati mereka beragama Islam, namun tetap menunjukkan kesetiaannya dalam mengemban tugas dan kepercayaan raja yang beragama Hindu. Sewajarnya apabila kemudian raja memberikan penghargaan berupa lahan khusus untuk membangun tempat tinggal mereka.

 Keteguhan dalam menganut ajaran Islam tidak menghalangi mereka untuk terus mengabdi bagi kerajaan Hindu, berbaur dengan masyarakat, dan berkiprah dalam membina kerukunan hidup bersama. Sikap semacam inilah yang justru menjadikan puri (istana; kerajaan) merasa segan dan memberi penghormatan tinggi. Dari sini kemudian dikenal istilah *nyame slam* (saudara Islam) yang dipergunakan oleh orang-orang Hindu untuk menyebut warga muslim. Istilah tersebut jelas menunjukkan makna akan adanya ikatan sosial yang begitu kuat antara warga Hindu dan warga Muslim. Dalam konteks interaksi sosial, sebuah sebutan dinilai memiliki muatan psikologis dan sosiologis. Muatan psikologisnya adalah sebutan tadi lahir dari suasana kebatinan masyarakat Hindu yang merasa dekat dan *mutual affinity* dengan warga muslim, tanpa ada prasangka apalagi kebencian. Muatan sosiologisnya, sebagai warga minoritas, umat Islam memperoleh pengakuan dan kedudukan yang setara dengan warga mayoritas Hindu, tanpa ada diskriminasi apalagi segregasi.

 Eksistensi komunitas muslim Kampung Loloan telah berakulturasi sedemikian rupa dengan budaya Bali, sehingga mereka pun layak disebut sebagai orang Bali atau Melayu Bali. Budaya Bali menjadi lebih berwarna karena akulturasi tersebut. Jadi, budaya Bali tidaklah identik dengan Hinduisme, karena terdapat warna lain (baca: Islam) dalam mosaik kultural Bali tanpa berkurang nilai “keasliannya”. Proses akulturasi mengarah pada integrasi selektif, yakni komunitas muslim beradaptasi dengan budaya lokal Bali, berbaur dalam kehidupan sosial tanpa mengorbankan aspek prinsipil keyakinan yang dianut, tetap menjunjung tinggi kemajemukan, dan proaktif dalam merajut kebersamaan. Melalui akulturasi dengan pola integrasi selektif, komunitas muslim Kampung Loloan mampu memilahkan antara Bali dan Hindu, antara yang kultural dan yang religius, karena itu mereka tidak begitu saja membuat garis pembatas untuk memisahkan Islam dan Bali yang memang kental dengan balutan tradisi Hinduismenya. Komunitas muslim mampu menyerap dan meramu kultur Bali, kemudian menghadirkan Islam yang sarat dengan corak lokalitas.

 Akulturasi Islam dalam konteks budaya Bali merupakan langkah kreatif menyerap dan meramu kultur setempat, kemudian mengartikulasikan Islam yang ramah dengan “tradisi lokal”. Dengan demikian, proses akulturasi dibutuhkan sebagai pijakan untuk mengartikulasikan Islam agar pesan ajaran yang dihadirkan tidak terasa asing, bahkan layak dipandang sebagai bagian dari kultur asali. Akulturasi budaya ditunjukkan adanya penerimaan warga muslim Loloan terhadap larangan memotong bambu di hari Minggu yang menjadi bagian dari pantangan warga Hindu Bali.[[49]](#footnote-49) Selain itu, secara rutin setiap peringatan tahun baru hijriyah diadakan pawai *Muharaman* yang diikuti oleh siswa-siswi dari pelbagai sekolah/madrasah di sekitar Loloan dengan mengenakan kain *prada* (kain khas) Bali sebagai bagian dari kostum adalah wujud vernakularisasi berbusana yang sesuai adat ke-Bali-an. Di sini, Islam dan Bali bisa menyatu atau setidaknya harmonis; keduanya tidak perlu dipisahkan apalagi dipertentangkan. Bagi muslim, mengenakan kostum seperti itu dalam pawai jelas memiliki fungsi ganda: mengapresiasi adat ke-Bali-an dan menghadirkan Islam dalam balutan tradisi yang mampu mendekatkan antara warga muslim dan non muslim Bali.

**Persoalan Aktual dalam Membangun Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama**

Identitas merupakan salah satu persoalan utama dalam kehidupan sosial yang majemuk. Tak ayal lagi, banyak ditemukan penggunaan aneka simbol di ruang publik yang sebenarnya ditujukan untuk meneguhkan identitas diri/kelompok dalam rangka membangun kohesi dan solidaritas internal, sekaligus untuk menyampaikan pesan mengenai eksistensi diri/kelompok kepada pihak luar (eksternal). Seakan telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki kecenderungan menggolongkan diri (*needs for belonging*) menjadi “kita” dan “mereka”[[50]](#footnote-50), dan di sinilah makna sosial suatu identitas. Secara sosiologis, pembentuk identitas seringkali tidak tunggal, bisa berupa: agama, profesi, etnis, kasta, parpol, dan lainnya.

 Cara berpikir oposisi biner atau *Rwa Bhineda* yang banyak dianut masyarakat Bali[[51]](#footnote-51) dinilai potensial mendorong pemaknaan identitas secara idiologis. Artinya, identitas tidak lagi dipahami sebagai penanda kelompok yang bersifat cair, melainkan sebagai media pengelompokkan warga masyarakat yang bersifat rigid dan menuntut *supreme loyalty*. Dalam konteks ini, pemaksaan simbol identitas tertentu, seperti kasus “Pembulelengan”, bisa menjadi ancaman serius bagi kerukunan hidup antar warga yang berbeda identitas. Kasus Pembulelengan dianggap sebagai gerakan massif “peng-Golkar-an” terhadap basis masyarakat loyalis PDIP, hingga memicu terjadinya bentrok berdarah pada 26 Oktober 2003 di Desa Petandakan Buleleng yang menelan korban jiwa, yakni massa pendukung PDIP menyerang dan membantai pendukung Golkar.[[52]](#footnote-52) Aksi massa serupa juga ditemukan di pelbagai daerah lain, seperti: Badung, Karangasem, Gianyar, Denpasar, dan Jembrana.[[53]](#footnote-53)

 Sejalan dengan kasus tersebut, polemik dan ketegangan yang pernah terjadi pada tahun 2017 menyangkut pembangunan padmasana di areal kantor Lurah Loloan Barat yang tengah direnovasi[[54]](#footnote-54) merupakan wujud konflik identitas. Pemerintah Kabupaten Jembrana memiliki program pembangunan 51 kantor desa/kelurahan, termasuk kantor lurah Loloan Barat. Salah satu fasilitas umum untuk setiap kantor desa/kelurahan adalah padmasana, yaitu tempat persembahyangan dan sesaji bagi umat Hindu. Hal ini dinilai telah sesuai dengan rancangan umum renovasi dan pembangunan kantor desa/kelurahan di seluruh Jembrana. Umat Islam sebagai warga mayoritas di Loloan Barat merasa keberatan apabila di kantor kelurahan dibangun padmasana. Kebijakan Pemerintah Kab. Jembrana dinilai tidak menghargai kekhasan Desa Loloan Barat yang mayoritas warganya beragama Islam. Menurut kelompok warga yang menolak, seharusnya ada kebijakan khusus dalam pembangunan kantor desa/kelurahan Loloan Barat, yakni tanpa padmasana. Sementara itu, pihak Pemerintah Kab. Jembrana menganggap pembangunan padmasana sudah menjadi bagian dari rancangan umum, desain, dan standar pembangunan 51 kantor desa/kelurahan se Kabupaten Jembrana.

 Agar masalah tidak berlarut-larut, Wakil Bupati Jembrana mengingatkan semua pihak untuk ikut menyejukkan suasana. Polemik yang terjadi sejatinya hanyalah karena miskomunikasi.[[55]](#footnote-55) Warga muslim Kampung Loloan Barat pun akhirnya bisa menerima demi menjaga kerukunan dan keharmonisan. Mereka menyadari, di kantor Desa Loloan Timur juga dibangun padmasana dan warga Muslim pun merasa tidak keberatan.[[56]](#footnote-56) Dalam kasus tersebut, warga Muslim Kampung Loloan menunjukkan sikap toleran yang tinggi. Mereka siap menerima keberadaan tempat peribadatan agama lain, bahkan mereka juga sudah terbiasa dengan keberadaan dua tempat peribadatan beda agama yang lokasinya berdekatan. Untuk mengatasi polemik itu, pihak Pemerintah Kabupaten Jembrana mengundang para tokoh masyarakat, seperti Danramil, Kapolres, MUI, NU, camat/lurah, dan pemuka umat Islam Loloan Barat, di Kantor Camat Nagara. Dalam pertemuan para tokoh tersebut, Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi, sekaligus mengajak semua pihak untuk mengedepankan musyawarah/mufakat dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Inilah langkah konkret Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan mengikutsertakan warga muslim dalam meminimalisasi konflik sosial dan berupaya memperjuangkan tercapainya kepentingan dengan tetap memperhatikan prinsip musyawarah/mufakat.

 Selain menyangkut identitas, persoalan penting lainnya yang dihadapi warga muslim di sana adalah kekerasan atasnama agama (baca: Islam). Meski aktor kekerasan bukan muslim Bali, namun dengan justifikasi doktrin Islam atas tindakan teror dan pengrusakan sebagai pelaksanaan jihad, persepsi masyarakat Hindu Bali terhadap warga muslim pun berubah. Hal ini ditunjukkan, antara lain, oleh penggantian sebutan *nyame slam* dengan *jalma slam* (orang Islam) yang berarti masyarakat Hindu Bali tidak lagi mengganggap warga muslim sebagai “saudara”[[57]](#footnote-57) atau setidaknya ada sikap dingin yang diperlihatkan mereka saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan warga muslim. Kasus Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005) adalah bentuk rangkaian aksi teror, kekerasan, dan pengrusakan berskala luas dan tergolong sangat keji. Kasus ini tidak hanya mengakibatkan hancurnya sendi-sendi ekonomi parawisata, tetapi juga banyak warga muslim pendatang harus eksodus dari Bali dan terkoyaknya simpul-simpul harmoni antara warga muslim dan warga Hindu di Bali.[[58]](#footnote-58)

 Kasus Bom Bali menjadi salah satu pemantik timbulnya prasangka sosial warga Hindu terhadap warga muslim Bali dan pendatang.[[59]](#footnote-59) Kasus ini telah mengekskalasi gerakan *Ajeg Bali* yang ditafsirkan secara beragam, diantaranya: *Ajeg Bali*  ditafsirkan dalam perspektif konservatif-romantik yang banyak dipengaruhi indologi Bali. Di sini, *Ajeg Bali* ditafsirkan sebagai *Ajeg Hindu* yang menganggap Bali harus kembali ke tradisi dresta yang sudah lama ada, mengingat perubahan yang terjadi selama ini justru menjadi ancaman serius bagi keutuhan budaya Bali.[[60]](#footnote-60) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 yang menggantikan desa Adat dengan desa Pakraman, misalnya, kian mengokohkan “Ajeg Hindu”. Sebab, melalui regulasi desa Pakraman, warga Bali bisa memperoleh hak istimewa semisal kucuran dana khusus dari Pemda di luar dana desa. Terbentuknya desa Pakraman mempersyaratkan tiga hal, yaitu (1) *Parahyangan* (pura dan tempat suci bagi agama Hindu), (2) *Pawongan* (warga desa yang beragama Hindu), dan (3) *Palemahan* (wilayah desa).[[61]](#footnote-61) Dengan persyaratan itu, sulit kiranya bagi warga muslim yang mendiami kantong-kantong tertentu, termasuk kampung muslim Loloan, untuk bisa membentuk desa Pakraman.

 Adanya regulasi dan kebijakan menyangkut desa Pakraman dipandang tidak sekedar mengakui Hindu sebagai agama mayoritas warga Bali, tetapi juga menempatkannya sebagai “kelas pertama” yang berhak mendapatkan keistimewaan. Pasca Bom Bali, regulasi dan kebijakan mengenai desa Pakraman tersebut dinilai *sudah sewajarnya* mengingat ia menjadi benteng terakhir dan aktor sentral dalam menjaga Bali dari serangan teroris dan pendatang.[[62]](#footnote-62) Bagi warga muslim Bali, sedikit-banyak regulasi dan kebijakan itu melahirkan suasana kebatinan bahwa mereka adalah kelompok minoritas dan berada pada *second class* dalam hirarkhi sosial kewargaan di Bali. Suasana kebatinan semacam ini sebenarnya tidak ideal untuk mewujudkan kerukunan hidup antar warga yang berbeda agama dalam kerangka kesederajatan. Namun, kedewasaan dalam berkewargaan (*citizenship*) yang mendorong komunitas muslim Bali untuk tidak mempersepsikan hal itu sebagai bentuk diskriminasi sosial dan ketidakadilan.

**Kesimpulan**

Eksotisme Bali tidak hanya terletak pada keelokan alamnya, kreativitas seni-kulturalnya, dan Hinduisme dengan kekayaan tradisi ritualnya, tetapi juga pada sejarah minoritas Islam dengan keragaman dan kekenyalan budayanya. Sejarah perkembangan Islam telah menghadirkan sisi lain dari eksotisme Bali karena mampu merangsang proses akulturasi budaya, melahirkan kearifan lokal, dan memperkaya khazanah kultural, terlebih dalam konteks hubungan antar agama di sana. Sebagai daerah yang dinobatkan menjadi destinasi wisata unggulan, Bali senantiasa menarik untuk dikunjungi dan dikaji. Salah satu alasannya, persoalan relasi Islam, Hindu, dan Bali yang terkesan masih luput dari perhatian akademisi karena pengaruh hingar-bingar pariwisata yang begitu membahana. Sewajarnya, apabila publik mengenal atau membayangkan Bali lebih mengenai pelbagai obyek wisatanya yang eksotis.

 Islam bukanlah agama “pendatang”; Islam adalah agama yang dianut oleh warga asli Bali. Memang pada masa awal proses Islamisasi, Islam disebarluaskan oleh pendatang. Namun, seiring perjalanan waktu, Islam pun berbaur dan menyatu dengan kepribumian Bali. Sebagai destinasi wisata terkenal, Bali dibanjiri banyak pendatang dari pelbagai daerah untuk tinggal dan mengais rezeki, yang sebagian mereka beragama Islam. Fakta empiris ini tidak berarti menegasikan sejarah panjang Islamisasi di Bali yang kurunnya hampir bersamaan dengan proses Islamisasi di Jawa dan daerah lain di kepulauan Nusantara. Kendati tingkat keberhasilannya barangkali tidak sebaik di Jawa, namun sejarah panjang Islamisasi di pulau Dewata telah mampu mengokohkan perkembangan Islam di kantong-kantong tertentu, yang lazim disebut kampung muslim, seperti Kampung Muslim Loloan Kab. Jembrana. Kampung muslim ini terbentuk sudah ratusan tahun yang lalu, sehingga sangat beralasan manakala mereka merasa sebagai orang asli Bali. Dalam kepungan mayoritas masyarakat Hindu, komunitas Muslim di kampung tersebut berhasil menunjukkan vitalitasnya, yakni kemampuan beradaptasi secara dinamis, menyerap secara selektif, dan berkreasi secara produktif.

 Kedudukan sebagai kampung “istimewa” disadari warga muslim kampung Loloan memiliki akar sejarah yang panjang dari adanya hubungan harmonis antara Islam, puri (istana) dan umat Hindu. Kesadaran ini mendorong mereka untuk tidak bersikap layaknya *kacang lupa kulit* dengan mengingkari titik simpul sejarah kebersamaan. Hubungan harmonis Islam, puri, dan umat Hindu adalah titik simpul sejarah kebersamaan dan sekaligus nilai kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan melalui pelbagai tradisi sosial seperti *Loloan Tempo Doeloe*, *Muharaman*, dan buka puasa bersama. Dengan demikian, bagi warga muslim kampung Loloan, pemerintah, tradisi Hindu dan Bali, menjadi konteks artikulasi Islam yang kontekstual dan menyejarah. Di sini, muslim kampung Loloan adalah warga asli Bali dan *nyame* warga Hindu (*nyame selam*). Artinya, warga Muslim dan warga Hindu memiliki *collective identity* ke-Bali-an, dan *mutual affinity* kebersamaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afif Muhammad, 2013. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman di Indonesia,* Bandung: Marja.

Alef Theria Wasim, dkk. (ed), 2005. *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik dan Pendidikan*, Yogyakarta: Oasis.

Alo Liliweri, 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media.

Anthony Reid, 2015. “Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia”, dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, terj. Gunawan Admiranto, dkk., Bandung: Mizan.

Azyumardi Azra, 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: Buku Kompas.

Bahtiar Effendy, 2001b. *Masyarakat, Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press.

Burhanuddin, Y.M. 2008. *Bali yang Hilang: Pendatang, Islam dan Etnisitas di Bali*, Yogyakarta: Impulse Kanisius.

Chris Barker, 2000. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Bentang.

Deni Miharja, 2013. “Adat, Budaya dan Agama Lokal: Studi Gerakan *Ajeg Bali* Hindu Bali”, *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 7 Nomor 1.

Dwipayana, AAGN Ari (ed), 2012. *Bulan Sabit di Pulau Dewata: Jejak Kampung Islam Kusamba-Bali*, Yogyakarta: CRCS UGM.

Elizabeth K. Nottingham, 1997. *Agama dan Masyarakat*, terjemahan Abdul Muis N., Jakarta: Rajawali Press.

Faisal Islam, 2000. “Memberdayakan Kearifan Lokal dalam Mencegah Konflik Komunal”, *Makalah* (dimuat dalam situs *dakwah.uin-suka.ac.id*, diunduh pada 28/3/2017).

Indriana Kartini, “Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII/No.2/2011.

Joko Tri Haryanto, 2013. “Kontribusi Ungkapan Tradisional dalam Membangun Kerukunan Beragama”, *Jurnal Walisongo* UIN Semarang (Vol. 21, No. 2).

Meredith B. McGuire, 1992. *Religion: The Social Context*, California: Wadsworth Publishing.

Mudji Sutrisno SJ, 2014. *Membaca Rupa Wajah Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.

Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (ed), 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.

Mujiburrahman, 2008. *Mengindonesiakan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumarti, Titik MC, “Interaksi dan Struktur Sosial” dalam Nasdian, Fredian Tonny (ed), 2015. *Sosiologi Umum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nengah Bawa Atmadja, 2010. *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*, Yogyakarta: LKiS.

Nengah Bawa Atmadja, 2010. *Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Paulus Wirutomo, dkk., 2012. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Purna, I Made, 2016. “Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa dalam Mewujudkan Toleransi”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, Nomor 2 Agustus.

Pip Jones, 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, terj. A.F. Saefudin, Jakarta: Obor.

Riaz Hassan, 2006. *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, terjemahan Jajang Jahroni dkk., Jakarta: Rajagrafindo Persada Press.

Potter, W. James, 1996. *An Analysis of Thinking and Research about Qualitative Methods*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Association.

R. Siti Zuhro, dkk., 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Ombak.

Suprapto, 2010. *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*, Jakarta: Kencana.

Sutiyono, 2010. *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, Jakarta: Kompas.

Udasmoro, Wening (ed), 2017. *Dari Doing ke Undoing Gender: Teori dan Praktik dalam Kajian Feminisme*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

1. Artikel ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang di danai LPPM dengan dana BOPTN tahun 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Y.M. Burhanuddin, 2008. *Bali yang Hilang: Pendatang, Islam dan Etnisitas di Bali*, Yogyakarta: Impulse Kanisius. Hlm. 51 [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Siti Zuhro, dkk., 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Ombak. Hlm. 200. [↑](#footnote-ref-3)
4. Y.M. Burhanuddin, Bali yang Hilang......, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-4)
5. Clifford Geertz, 1992, Negara: the Theater State in Nineteeth century Bali, NJ: Princenton University Press, Hlm. 129-130. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anthony Reid, 2015. “Pluralisme Agama Sebagai Tradisi Asia”, dalam Bernard Adeney-Risakotta (ed.), *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, terj. Gunawan Admiranto, dkk., Bandung: Mizan. Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nengah Bawa Atmadja, 2010. *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*, Yogyakarta: LKiS. [↑](#footnote-ref-7)
8. *www.antaranews.com*, diunduh pada 19/10/2017. [↑](#footnote-ref-8)
9. R. Siti Zuhro, dkk., 2009. *Demokrasi Lokal.....* hlm. 208 [↑](#footnote-ref-9)
10. Elizabeth K. Nottingham, 1997. *Agama dan Masyarakat*, terjemahan Abdul Muis N., Jakarta: Rajawali Press. Hlm. X. [↑](#footnote-ref-10)
11. Meredith B. McGuire, 1992. *Religion: The Social Context*, California: Wadsworth Publishing. Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mujiburrahman, 2008. *Mengindonesiakan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 48. Bahtiar Effendy, 2001b. *Masyarakat, Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press. Hlm. 21 [↑](#footnote-ref-12)
13. *bimasislam.kemenag.go.id*, diunduh pada 18/10/2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Suprapto, 2010, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*, Jakarta: Kencana. [↑](#footnote-ref-14)
15. I Nyoman Dhana dkk., “Kearifan Lokal Masyarakat Jatiluwih: Potensi Warisan Budaya Dunia”, laporan penelitian kelompok, Bali: Universitas Udayana tahun 2014. [↑](#footnote-ref-15)
16. Indriana Kartini (LIPI), “Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali”, Jurnal *Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII, Number 2, 2011. [↑](#footnote-ref-16)
17. AAGN Ari Dwipayana (ed), *Bulan Sabit di Pulau Dewata: Jejak Kampung Kusamba-Bali.* Yogyakarta: CRCS UGM, 2012. [↑](#footnote-ref-17)
18. I Gede Suwindia, dkk., “Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali”, *Jurnal al-Ulum*, Vol. 12, Nomor 1, 2012 [↑](#footnote-ref-18)
19. I. Abdullah, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 81 [↑](#footnote-ref-19)
20. Mudji Sutrisno & Hendar Putranto (ed), 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 56-57. [↑](#footnote-ref-20)
21. Mujiburrahman, 2008. *Mengindonesiakan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 71-73 [↑](#footnote-ref-21)
22. Tarmizi Taher, *Menuju Ummatan Wasthan*, Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998, hlm. 50 [↑](#footnote-ref-22)
23. Suprapto, 2010. *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 60-61 [↑](#footnote-ref-23)
24. Alo Liliweri, 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media. Hlm. 227-236 [↑](#footnote-ref-24)
25. dakwah.uin-suka.ac.id, diunduh pada 29/3/2017. [↑](#footnote-ref-25)
26. W. James Potter, 1996. *An Analysis of Thinking and Research about Qualitative Methods*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Association. Hlm. 109-110 [↑](#footnote-ref-26)
27. Chris Barker, 2005. *Cultural Studies: Teori & Praktik*, Yogyakarta: Bentang, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-27)
28. Martin Ramstedt, 2011, *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas pada Masa Pascaorde Baru*, Jakarta: Grasindo, hlm. 41-42 [↑](#footnote-ref-28)
29. Ngurah Suryawan, 2010, *Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, Jakarta: Kencana, hlm. 284 [↑](#footnote-ref-29)
30. Gde Putra Agung, 2009, *Peralihan system Birokrasi dari Tradisonal ke Kolonial*, Yogyakrata: Pustaka Pelajar, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*., hlm.42 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Wawancara* pada 4 Oktober 2018; “Inilah Sejarah Masuknya Islam di Bali”, <https://suaramuslim.net>, diunduh 24 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Wawancara*, 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-33)
34. Nengah Bawa Atmadja, 2013, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas kultural dan Modernisasi*, Yogyakarta : LKiS, hlm. 341. [↑](#footnote-ref-34)
35. <https://www.kompasiana.com>, diunduh 22 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-35)
36. Arifin Brandan, “Loloan: Sejumlah potret umat Islam di Bali”, Yayasan Festival Istiqlal, tt., hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Wawancara*, 5 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-37)
38. koranjuri.com>amp, diunduh 20 Oktober 2018; *Wawancara*, 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Wawancara*, 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Observasi*, 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-40)
41. Suprapto, 2010, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*, Jakarta: Kencana, hlm. 60-61. [↑](#footnote-ref-41)
42. Alo Liliweri, 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 227-236 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Wawancara*, 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Wawancara dan Observasi,* 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Wawancara dan Observasi,* 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-45)
46. “Loloan Kampung Tertua”, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diunduh pada 12 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-46)
47. “Loloan, Kampung Tertua Jejak Islam di Bali”, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diunduh pada 13/12/2018 [↑](#footnote-ref-47)
48. I Putu Gede Suwitha dalam I Made Purna, dkk., 2013: xvi-xvii. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Wawancara*, 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-49)
50. Wirutomo, dkk., *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-50)
51. Atmadja, 2013, *Ajeg Bali*, hlm. 8-10 [↑](#footnote-ref-51)
52. Ngurah Suryawan, 2010, *Genealogi*, hlm. 1-4. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*., hlm. 271. [↑](#footnote-ref-53)
54. “Polemik Loloan Barat”, <https://beritabali.com>, diunduh pada 15/12/2018 [↑](#footnote-ref-54)
55. “Polemik Tolak Proyek Padmasari”, <https://radarbali.jawapos.com>, diunduh 15/12/2018 [↑](#footnote-ref-55)
56. Wawancara, 6 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-56)
57. Atmadja, 2013, *Ajeg Bali*, hlm. 346 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Wawancara*, 5-7 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-58)
59. Atamadja, 2013, *Ajeg Bali*, hlm. 370; Suryawan, 2010, hlm. 258. [↑](#footnote-ref-59)
60. Suryawan, 2010, hlm. 263 [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid*., hlm. 270 [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-62)